

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Suatu Negara memiliki peraturan dan kebijakan dalam membangun negaranya. Peraturan tersebut ditetapkan dalam upaya pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah suatu proses pengembangan sistem penyelenggaraan negara secara keseluruhan untuk mewujudkan tujuan negara. Tingkat pembangunan suatu negara yang semakin besar dapat mengindikasikan bahwa negara tersebut semakin maju dan berkembang. Percepatan pembangunan dilakukan agar tidak tertinggal dalam persaingan pasar bebas. Ada beberapa indikator yang dapat mempercepat pembangunan nasional, seperti pertumbuhan ekonomi, indeks kualitas hidup, indeks pembangunan manusia, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya.

Hal tersebut tentunya tidak terlepas dari peranan pembangunan daerah yang menjadi bagian penting dari pembangunan nasional. Pemerintah pusat membuat kebijakan otonomi daerah yang dicanangkan agar mendorong pemerintah daerah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan daerah. Pemberian otonomi daerah akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi, karena pemerintah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Sehingga Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menggunakan sumber-sumber keuangannya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat di daerah tersebut untuk mengembangkan kegiatan ekonomi daerah.

Menurut Keynes dalam (Priyono & Ismail, 2012), pemerintah berperan dalam membangun perekonomian. Teori umum Keynes lebih mengandalkan kebijakan fiskal, dimana kebijakan fiskal pemerintah dapat mempengaruhi jalannya perekonomian. Hal ini dilakukan dengan menyuntikkan dana pengeluaran pemerintah untuk mendanai proyek-proyek yang dapat menyerap tenaga kerja. Teori Keynes ini sangat mampu meningkatkan output dan mengurangi pengangguran di situasi sumber daya belum dimanfaatkan secara penuh.

Penerapan kebijakan otonomi suatu daerah menyebabkan keuangan daerah dikelola secara mandiri oleh pemerintah daerah yang bertujuan agar proses pembangunan yang dilakukan daerah dapat diselesaikan tanpa harus menunggu bantuan pendanaan yang bersumber dari pusat. Kemampuan mengelola keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tercermin pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, seperti kemampuan dari pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan pendapatan daerahnya serta mampu membiayai pembangunan daerah dan pelayanan sosial yang diberikan kepada masyarakat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah ruang lingkup keuangan daerah pada tingkat pemerintah daerah yang terdiri dari tiga komponen, yaitu pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Dari ketiga indikator tersebut, yang paling penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yaitu pendapatan. Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, pemerintah daerah harus memaksimalkan pengelolaan sumber daya potensial yang ada dan membentuk kemitraan dengan masyarakat baik sebagai investor dan/atau pekerja sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru yang akan mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut.

Pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh infrastruktur maupun sarana prasarana daerah. Jika sarana dan prasarana terpenuhi, maka masyarakat dapat melakukan kegiatan sehari-harinya dengan aman dan nyaman. Hal tersebut akan berdampak pada tingkat produktivitas yang semakin meningkat karena adanya infrastruktur yang memadai. Semakin meningkatnya produktivitas maka akan bertambah pula Pendapatan Asli Daerah. Menurut Mardiasmo dalam (Purwanto, 2013) saat ini pemerintah daerah masih memiliki banyak permasalahan terkait dengan upaya peningkatan penerimaan daerah dan keterbatasan sarana prasarana yang tidak mendukung untuk kegiatan investasi. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan pendapatan yang rendah dan/atau alokasi yang kurang tepat.

Fenomena yang terjadi di pemerintah daerah kabupaten/kota provinsi Jawa Barat menggambarkan tidak semua pemerintah daerah mapan secara

keuangan. Ini terlihat dari data pertumbuhan belanja daerah yang merupakan salah satu indikator dari kinerja keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan adanya perbedaan dan tidak merata pertumbuhan belanja daerah. Berdasarkan fenomena di atas terdapat masalah berupa kemampuan keuangan pemerintah daerah yang tidak merata dalam mengalokasikan belanja daerahnya, sebagian daerah menunjukkan tingkat pertumbuhan yang tinggi dan sebagian lagi menunjukkan tingkat pertumbuhan yang sangat rendah. Perbedaan yang signifikan dari pertumbuhan belanja daerah untuk kabupaten/kota yang ada di Jawa Barat menunjukkan telah terjadi kesenjangan kemampuan keuangan antar daerah yang pada akhirnya akan menimbulkan kesenjangan kesejahteraan antar daerah. Adapun sebagai gambaran perbedaan kemampuan keuangan pemerintah daerah kabupaten Cirebon dengan daerah lain dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 1.1**  
**Perbedaan Pertumbuhan Pendapatan dan Belanja Daerah**  
**Tahun 2019**

Pemerintah Daerah	Kabupaten Kuningan	Kabupaten Majalengka	Kabupaten Cirebon	Kabupaten Sumedang	Kabupaten Indramayu
<b>Belanja daerah</b>	2.561.587.903	3.365.968.084	3.365.968.084	2.740.632.036	3.984.017.408
<b>Pendapatan daerah</b>	2.561.587.903	3.323.697.562	3.361.696.315	2.734.776.284	3.970.817.408

Sumber data : [jabar.bps.go.id](http://jabar.bps.go.id)

Dari tabel diatas, dapat terlihat bahwa setiap daerah memiliki kinerja keuangan yang berbeda. Kemampuan keuangan pemerintah daerah yang tidak merata dipengaruhi oleh sumber daya alam, sumber daya manusia dan potensi yang ada pada setiap daerah dan pengalokasian belanja daerah yang tepat. Kabupaten Cirebon memiliki pertumbuhan pendapatan dan belanja yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Salah satu sumber keuangan daerah yang dikelola pemerintah daerah yaitu berasal dari Pendapatan Asli Daerah. PAD dapat mencerminkan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin tinggi PAD maka semakin tinggi tingkat kemandirian suatu daerah dalam mengelola sumber pendapatan.

Namun dalam media online (radarcirebon, 2019) Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Cirebon masih di bawah 20 persen. Nilainya,

sekitar Rp700 miliar dari total APBD Kabupaten Cirebon sebesar Rp 4 triliun. Menurut Pejabat Bupati Cirebon Dr Ir H Dicky Saromi MSc (9/5), akibat PAD yang belum diraih secara maksimal, berimbas pada keleluasaan dalam melaksanakan pembangunan. Sehingga, kebutuhan akan pendanaan APBD masih banyak yang harus *discover*. Untuk itu pemerintah harus mengoptimalkan sumber pendapatan yang dikelola. Adapun pendapatan dan belanja daerah kabupaten Cirebon dalam 5 tahun dapat digambarkan dalam tabel berikut:

**Tabel 1.2**  
**Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2015-2019**

Kabupaten Cirebon	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Pendapatan (triliun)	3,095	3,332	3,591	3,683	3,361
Belanja (triliun)	2,987	3,419	4,139	3,681	3,450

Sumber data : [jabar.bps.go.id](http://jabar.bps.go.id)

Berdasarkan tabel 1.2 tersebut, dapat terlihat bahwa setiap tahun pendapatan dan belanja daerah mengalami fluktuasi. Pendapatan terbesar yang diperoleh kabupaten Cirebon sebesar 3.68.068.266,64 triliun yaitu pada tahun 2018. Namun pada tahun 2019 pendapatan mengalami penurunan yang signifikan sebesar 3,21 miliar sehingga menjadi 3,361 miliar. Pengeluaran daerah atau belanja daerah terbesar yaitu pada tahun 2017 sebesar 4,139 miliar dan pada tahun 2018 mengalami pengeluaran yang lebih rendah dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 3,681 miliar dan pada tahun 2019 juga mengalami penurunan dari tahun 2018 yaitu sebesar 3,450. Dari tabel tersebut juga terlihat bahwa setiap tahunnya belanja daerah menunjukkan angka yang lebih besar dari pendapatan, sehingga APBD menunjukkan defisit.

Pertumbuhan pendapatan daerah mengalami kenaikan atau penurunan tergantung dari seberapa besar sumber-sumber keuangan daerah mampu menghasilkan pendapatan bagi daerahnya. Pendapatan daerah kabupaten Cirebon dapat meningkat dari sebelumnya apabila pemerintah dapat mengoptimalkan dengan menekankan pada penggalian potensi-potensi sumber daya lokal daerah kabupaten Cirebon sehingga pertumbuhan ekonomi

meningkat. Pertumbuhan ekonomi kabupaten cirebon dapat dilihat pada tabel berikut ini: (Tim Penyusun, 2019)

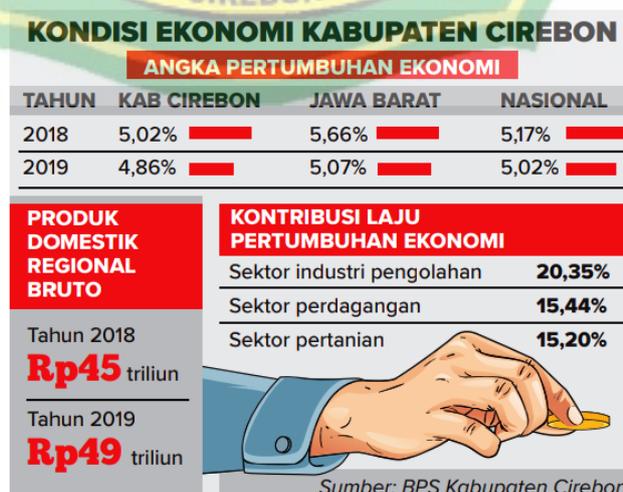
**Gambar 1.3**  
**Pertumbuhan PDRB dan Laju Pertumbuhan Ekonomi**  
**Kabupaten Cirebon Tahun 2015-2019**

Tahun	PDRB (atas harga konstan)	Laju Pertumbuhan
2015	27.596.354,8	4,88 %
2016	29.149.311,9	5,63 %
2017	30.623.305,8	5,06 %
2018	32.160.192,4	5,02 %
2019	33.723.897,2	4,86 %

sumber data : cirebonkab.bps.go.id

Data diatas merupakan data laju pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari PDRB menurut pengeluaran. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan ekonomi mengalami fluktuasi. Laju pertumbuhan pada tahun 2015 sebesar 5,88% dan pada tahun berikutnya 2016 laju pertumbuhan mengalami kenaikan menjadi 5,63% dan merupakan laju pertumbuhan tertinggi selama periode 2015-2019. Namun pada tahun selanjutnya mengalami penurunan setiap tahunnya. Laju pertumbuhan terendah dalam lima periode yaitu pada tahun 2019 sebesar 4,86%. Penurunan laju pertumbuhan ekonomi tidak sejalan dengan PDRB yang setiap tahunnya mengalami kenaikan.

**Gambar 1.1**  
**Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Cirebon**  
**2018-2019**



Sumber data: [radarcirebon.go.id](http://radarcirebon.go.id)

Salah satu indikator yang penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah atau provinsi dalam suatu periode tertentu ditunjukkan oleh data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Nilai PDRB ini akan menjelaskan sejauh mana kemampuan daerah dalam mengelola atau memanfaatkan sumberdaya yang ada. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka diperlukan pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan distribusi pendapatan yang lebih merata.

Masalah pertumbuhan ekonomi di suatu daerah tergantung pada banyak faktor, salah satunya adalah kebijakan pemerintah itu sendiri. Kebijakan pemerintah tersebut harus dikenali dan diidentifikasi secara tepat supaya pertumbuhan ekonomi dapat tercapai di suatu daerah. Selain itu, kondisi perekonomian secara keseluruhan di setiap daerah juga dapat dilihat dari seberapa besar jumlah belanja daerah. Bukan hanya pendapatan, belanja daerah pun turut berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah atau belanja daerah merupakan bentuk rangsangan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap perekonomian daerah.

Belanja daerah dapat mempengaruhi kualitas pelayanan publik di suatu daerah. *Keynesian teory* menyatakan bahwa belanja yang dilakukan pemerintah dapat berfungsi sebagai suatu kebijakan ekonomi yang akan berdampak pada pertumbuhan perekonomian di suatu daerah (Antari & Sedana, 2018). Semakin besar nilai belanja daerah yang dialokasikan untuk pembangunan, maka akan meningkatkan kesejahteraan penduduk. Ini berarti kondisi ekonomi di daerah tersebut juga akan meningkat.

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu diketahui lebih lanjut sejauh mana faktor pendapatan dan belanja daerah dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Cirebon. Untuk itu penulis membahas mengenai **Pengaruh Pendapatan Daerah dan Belanja Langsung Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Cirebon Tahun 2015-2019.**

## **B. Rumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti memberikan identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian sebagai berikut:

- a. Peran pemerintah daerah dalam memajukan perekonomian daerah dan kemampuan dalam menggali potensi-potensi penerimaan daerah.
- b. Pendapatan daerah yang diperoleh pemerintah daerah kabupaten Cirebon harus dapat memajukan ekonomi sebagai suatu upaya dalam membangun pertumbuhan ekonomi daerah.
- c. Anggaran belanja daerah harus mampu memenuhi sarana dan prasarana yang dapat memajukan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah.

### **2. Pembatasan Masalah**

Dari identifikasi masalah yang berkaitan tersebut, agar pembahasan tidak melebar maka penulis akan membatasi masalah pada pendapatan daerah dan belanja langsung daerah kabupaten Cirebon dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten Cirebon.

### **3. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah, dimana dalam masalah pendapatan daerah, belanja langsung daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah maka peneliti akan membahas mengenai:

- a. Bagaimana Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Cirebon?
- b. Bagaimana Pengaruh Belanja Langsung Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Cirebon?
- c. Bagaimana Pengaruh Pendapatan Dan Belanja Langsung Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Cirebon?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun peneliti, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui Pengaruh Pendapatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Cirebon.
2. Mengetahui Pengaruh Belanja Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Cirebon.
3. Mengetahui Pengaruh Pendapatan Daerah dan Belanja Langsung secara bersama-sama terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Cirebon.

### D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, antara lain sebagai berikut:

1. Secara Teoritis  
Secara teoritis penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk :
  - a. Pengembangan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan.
  - b. Penelitian ini diharapkan memberikan masukan kepada pembaca untuk digunakan sebagai bacaan atau referensi sumber data dalam penelitian.
2. Secara praktis
  - a. Bagi peneliti : penelitian ini bermanfaat untuk menguji kompetensi penulis terlebih dalam penerapan berdasarkan teori dan konsep yang telah dipelajari, terkhusus untuk meraih gelar SE.
  - b. Bagi akademis : penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Cirebon dan dapat menjadi tambahan wawasan mengenai pendapatan dan belanja daerah kabupaten Cirebon dan informasi kajian ilmiah yang mendukung pengembangan kebijakan fiskal.
  - c. Bagi masyarakat : hasil penelitian ini diharapkan menjadi sebuah acuan pembelajaran bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi.

## E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah gambaran alur pemikiran dari awal hingga akhir. Penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

**BAB I :** Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II :** Bab ini tentang teori-teori yang relevan dengan variable penelitian sebagai legitimasi konseptual. Penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah yang diteliti. Kerangka berfikir pola hubungan antara variabel atau kerangka konsep yang akan digunakan untuk menjawab masalah yang diteliti. Bab ini juga berisi mengenai hipotesis atau dugaan sementara yang masih perlu untuk diuji.

**BAB III :** Pada bab ini akan dibahas mengenai variabel penelitian dan definisi operasional variabel, penentuan populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

**BAB IV :** Pada bab ini menjelaskan deskripsi objek penelitian, proses dan teknik analisis data, hasil dari pengujian hipotesis penelitian sesuai dengan metode yang digunakan.

**BAB V :** Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian yang telah diperoleh. Pada bab ini juga menjelaskan keterbatasan dan saran untuk penelitian-penelitian selanjutnya agar dapat lebih mengembangkan penelitian.

